BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki banyak sekali keperluan hidup sehingga memerlukan adanya bantuan orang lain agar terpenuhinya suatu kebutuhan tersebut. Manusia sering berinteraksi antar satu dengan yang lain dengan memiliki berbagai tujuan dan kepentingan. Maka dari itu manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari melakukan aktivitas sebagai masyarakat dengan bersosialisasi, berkomunikasi, kerja sama, dan lainnya agar bisa saling melengkapi satu dengan lainnya. Suatu kegiatan bersosialisasi satu sama lain dalam kehidupan masyarakat tentu juga tidak lepas dari sebuah aturan yang mengikat, aturan yang dimaksud yaitu sebuah aturan hukum. Yang mana seperti yang diketahui bersama, bahwa manusia dan hukum merupakan suatu entitas yang saling mengikat dan tak bisa dipisahkan.

Hukum merupakan sebuah aturan resmi dan mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur hubungan satu individu dengan masyarakat luas atau umum. Hukum telah menjadi bagian penting dalam masyarakat karena hukum berfungsi untuk membela dan menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban umum. Selain itu, hukum juga mengatur mengenai hubungan satu orang dengan orang lainnya yang saling berkepentingan dalam ranah privat. Salah satunya mengenai

permasalahan pernikahan yang termasuk ke dalam hukum privat. Semua negara memiliki bagian – bagian tersendiri mengenai aturan hukum terhadap beberapa perkara, salah satunya negara Indonesia juga memiliki aturan hukum sendiri dalam berbagai ketentuan seperti halnya aturan hukum mengenai pernikahan atau perkawinan yang telah diatur melalui Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan Tahun 1974 .

Dalam bahasa Arab, dua kata dari istilah “*Zawwaja*”, yang berarti “Pasangan”, sedangkan “*Nakaha*” berarti “menggabungkan”, sehingga “Perkawinan” secara singkat berarti “menggabungkan dua orang menjadi satu”.¹ Terkait batas umur minimum bagi calon pengantin lelaki dan wanita sesuai pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan wanita 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Pada tahun 2019, telah diubah terkait batas minimal umur akan melangsungkan perkawinan baik perempuan dan lelaki menjadi 19 tahun sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974, bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara suami dan

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

² Kurniawan Dedy Permono, dkk. “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektifitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah”. *Notarius*, Vol. 14, No. 01, (2021): 178-193.

istri yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya ketika hendak melangsungkan suatu perkawinan, pasti terdapat beberapa aturan atau syarat yang harus diikuti. Dalam ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974, memuat ketentuan yang harus serta wajib diikuti salah satunya mengenai batas minimum usia calon untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu lelaki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Pada tahun 2019 terdapat adanya perubahan terkait batas minimum umur agar melakukan perkawinan yaitu terdapat perubahan pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan batas usia calon pasangan lelaki harus 19 tahun, dan calon wanita harus 19 tahun sehingga apabila calon pasangan akan melangsungkan pernikahan maka akan bertentangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan Tahun 2019).³

Dispensasi nikah atau kawin merupakan suatu bentuk usaha hukum yang dilakukan oleh pihak pemohonan agar dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh ketentuan Undang –

³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, “Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22.

Undang dengan alasan yang mendesak.⁴ Adanya peraturan yang sudah jelas menunjukkan batas minimal usia untuk menikah, tetapi masih ada masyarakat Indonesia yang belum memperhatikannya. Hingga saat ini masih banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah, dan berakhir dengan banyaknya perkawinan dini atau perkawinan anak di bawah umur. Pernikahan antara lelaki dan perempuan belum 19 tahun sudah ada pada Undang – Undang disebut perkawinan di bawah umur yang menyimpang dari Undang – Undang perkawinan terkait batas umur minimal untuk melakukan perkawinan.

Sehingga untuk masyarakat hendak melakukan perkawinan tetapi tidak cukup umur untuk menikah dengan begitu wajib mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Calon pengantin yang masih dibawah umur sebagai pemohon. Sesuai pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan orang tua berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagai wali anaknya. Adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah dianggap problematika pernikahan dibawah umur karena terdapat beberapa faktor yangmana kedua pihak yaitu calon pasangan suami istri pada saat mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah tanpa berpikir secara menyeluruh terkait dampak kedepan kehidupan

⁴ Irma Suryanti and Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 782–94.

selanjutnya dalam berumah tangga dengan usia yang belum siap. Sehingga rentan terjadinya konflik rumah tangga sedangkan dalam berkeluarga perlu adanya ketahanan dalam sebuah keluarga. Adanya pembaruan aturan mengenai batas minimal usia kawin berhubungan erat dengan pola pikir, tingkat kedewasaan, hingga tingkat kesiapan baik fisik maupun mental seseorang, pembaruan batas usia ini juga bertujuan untuk mencegah dari banyaknya dampak buruk dari adanya pernikahan dini atau dibawah umur seperti pendeknya usia pendidikan generasi muda.⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin membahas berbagai macam seperti asas, tujuan, ruanglingkup, ketentuan administrasi, pengajuan permohonan, dan pemeriksaan perkara, serta upaya hukum dan klasifikasi hukum (Selanjutnya disingkat dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019). Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sebagai lembaga hukum dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin berlandaskan pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, khususnya Pengadilan Agama Magetan.

Menurut UNICEF, Pada tahun 2020, Indonesia memiliki jumlah absolut mempelai anak ke-8 tertinggi di dunia dengan 1.459.000, berada di posisi urutan ke-2 di ASEAN dan ke-8 di dunia. Secara nasional, 11,2% anak perempuan menikah di bawah umur 18 tahun, dan 0,5% dari mereka

⁵ Mardi Canda and others, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenadamedia Group, 2021). 19.

menikah pada berusia 15 tahun.⁶ Mengutip Jawa Pos Radar Madiun, terlepas dari angka dispensasi kawin/nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2022, ratusan siswa di Magetan memilih nikah daripada sekolah. Ada 107 pengajuan dispensasi nikah selama tahun sebelumnya dan 101 telah ditolak, hal ini disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Magetan Mat Busril, Humas Pengadilan Agama Magetan menyampaikan rata – rata dispensasi nikah adalah pelajar yang tergolong belum cukup umur.⁷

Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang masih banyaknya permohonan dispensasi nikah yang terjadi terutama pada wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan sebagai jalan pintas agar terlaksanakannya pernikahan di bawah umur yang dianggap sebagai problematika karena menyebabkan terus bertambahnya pernikahan di bawah umur yang berujung ke perceraian karena kurang adanya kesiapan diri dari setiap mempelai pasangan. Meskipun terdapat kelonggaran hukum terkait aturan dispensasi nikah, bukan berarti masyarakat dapat melakukan hal tersebut dengan hanya bermodalkan mengajukan permohonan. Wajib terdapat alasan yang kuat dan/atau mendesak yang selanjutnya dapat

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional et al., “*Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda,*” 2020.

⁷ Hengki Ristanto, “Ratusan Pelajar di Magetan Ajukan Dispensasi Kawin, 18 diantaranya usia SD.”, Radar Jawa Pos Madiun, <https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/801220800/ratusan-pelajar-di-magetan-ajukandispensasi-kawin-18-diantaranya-usia-sd>, Selasa 10 Januari 2023, Pukul 18:14 WIB. Diakses 27 Agustus 2023

menjadi pertimbangan pengadilan untuk dapat mengabulkan permohonan tersebut.

Namun di sisi lain hakim juga wajib bijaksana dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, mengingat pembatasan usia minimal menikah dibuat bukan hanya sebagai aturan saja, ada banyak faktor dan alasan yang membuat aturan tersebut dibuat. Berdasarkan latar belakang ini, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan meninjau penelitian dengan judul, "Pelaksanaan Dan Problematika Yang Lahir Dari Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Magetan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dan problematika yang timbul dari pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan problematika yang timbul dari pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan

D. Orisinalitas Penelitian

Materi yang diangkat pada penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya, namun mempunyai karakteristik yang berbeda meskipun pokok bahasannya sama. Penelitian ini didukung dengan adanya data yang tertera sesuai pada kasus yang terjadi di masyarakat dalam Pengadilan Agama Magetan. Beberapa judul penelitian yang menjadi komprasi antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Sinta Oktaria, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis pada Tahun 2020”.⁸
 Persamaan: Sama-sama mengkaji dispensasi nikah di sebuah Pengadilan Agama. Perbedaan: Mengkaji dispensasi nikah di sebuah Pengadilan Agama serta faktor penyebab timbulnya dispensasi nikah. Perbedaan: Mengkaji alasan yang menyebabkan adanya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi nikah beserta konsekuensi hukumnya. Sedangkan penelitian penulis mengkaji bagaimana hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.
2. Skripsi Syamsiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul, “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisi Masalah)”.⁹ Persamaan: Mengkaji landasan putusan hakim saat memberikan putusan

⁸ Sinta Oktaria, “Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020” (Universitas Islam Riau, 2022).

⁹ Syamsiah Syamsiah, “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)” (IAIN Parepare, 2020).

permohonan dispensasi kawin. Perbedaan: Mengkaji adanya kajian tentang metode ijtihad yang hakim tempuh dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

3. Skripsi Nikmah Fitria, Fakultas Syariah, dengan judul “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec.Seputih Raman, Kab.Lampung Tengah)”.¹⁰ Persamaan: Mengkaji terkait pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaan: mengkaji terkait perkawinan pada sudut pandang hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan penelitian ini hanya dalam perspektif umum saja sesuai data lapangan.

Bahwa terkait pada orisinalitas penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu, diantaranya yaitu dalam pelaksanaan penelitian terdapat perbedaan mengenai kompetensi relatif atau wilayah kedudukan pihak yang berperkara. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Magetan, selain itu pelaksanaan terkait prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah, dari penelitian penulis tidak hanya berlandaskan dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 saja, namun juga terdapat beberapa persyaratan tambahan dari Pengadilan Agama Magetan yang harus terpenuhi agar dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah.

Perbedaan yang terakhir ialah mengenai landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah, dimana terdapat perbedaan

¹⁰ Nikmah Fitria, “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)” (IAIN Metro, 2018).

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara dispensasi nikah sepadan dengan alasan mendesak dari keterangan pihak pemohon, saksi, calon mempelai pada saat berada di ruang sidang dengan berbagai pertimbangan agar tidak menimbulkan permasalahan yang muncul bagi anak.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA